

ALASAN IRAN MENYETUJUI UNTUK BERUNDING DENGAN NEGARA P5+1 DALAM ISU NUKLIR IRAN DI TAHUN 2013

Hendrawan Dwi Setyanto

20130510271

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail : draw.tiga@gmail.com

Abstract

In 2013, Iran agrees to negotiate with the P5+1 country in the issue of Iranian nuclear programme. That was one of the most historical moment happened by Iran and P5+1 Countries. It is intended to ensure that Iran's Nuclear Program can be used for purely peaceful purposes and the exchange for Iran the negotiation would make sanctions made by United States of America, European Union and the United Nations sanctions on Iran lifted. Iran made the different decision to finally agree while in the past years Iran has denied all the accusation by the West. The aim of this paper is to describe why Iran agree to negotiate with P5 + 1 Countries. This study uses qualitative analysis, which the author tried to describe and explain the reason behind this. The data that author used comes from books, journals, documents, reports and some materials from the internet. This study shows that there are three aspects that influences Iran in making decision to negotiate with P5 + 1 Countries in terms of Iran nuclear programme. The first aspect is the domestic politics of Iran; the second is the economic condition of Iran; the third is the international context that Iran is related to.

Key words: Iran, Iran Deal, Iran Nuclear Programme, Decision Making Process, Hassan Rouhani.

Pendahuluan

Kondisi perpolitikan yang terjadi di Timur Tengah sering kali menjadi fokus bagi dunia. Seringkali, kebijakan dalam negeri suatu negara di Timur Tengah mampu untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara lainnya. Salah satu negara tersebut adalah negara Iran. Iran adalah negara di Timur Tengah yang mempunyai posisi strategis diantara Asia dan Eropa. Iran adalah negara Islam yang menganut mazhab Islam Syiah. Dalam kepemimpinan negaranya, Iran dipimpin oleh satu orang Presiden dan Iran juga memiliki *Supreme Leader* bernama Imam Ali Khamenei.

Iran memiliki permasalahan yang selalu disorot oleh dunia. Kepemilikan program nuklir Iran dilihat oleh dunia sebagai sesuatu

yang dapat membahayakan dunia. Adalah pada saat 2003 IAEA membuat laporan tentang Iran setelah inspeksi ke fasilitas Natanz dan menemukan adanya potensi yang dapat membahayakan dunia. Iran menyangkalnya dengan berdalih bahwa kepemilikan program nuklir Iran dilaksanakan untuk tujuan damai. Sejak saat itu, Iran mendapatkan banyak rintangan dalam menjalankan program nuklirnya. Amerika Serikat, Uni Eropa dan PBB berkali-kali memberikan sanksi kepada Iran agar mau melakukan perundingan dan agar Iran mau untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku (CNN, 2012). Akan tetapi, Iran tetap teguh dalam pendiriannya dan tetap berusaha bertahan dalam setiap sanksi yang diberikan.

Sebenarnya, kepemilikan program Nuklir Iran sudah ada sejak sebelum Revolusi Iran terjadi. Pada tahun 1957, Iran menandatangani sebuah perjanjian dengan

Amerika Serikat untuk pengembangan teknologi nuklir di Iran (Tharoor, 2015). Perjanjian ini memungkinkan Iran untuk membuat fasilitas nuklir bersama dengan Amerika Serikat dan setelah itu Iran juga mulai dibantu oleh negara lain dalam pengembangan nuklir ini. Sejak saat itu, hubungan Iran dengan Amerika Serikat menjadi semakin baik dan Iran memiliki beberapa fasilitas nuklir. Akan tetapi, setelah terjadi revolusi Iran di tahun 1979an, hubungan Iran dengan Amerika Serikat menjadi renggang sehingga membuat Iran kehilangan hubungan baiknya baik dengan negara Amerika maupun negara lainnya.

Revolusi Iran mau tak mau membuat Iran menjadi negara yang sangat berhati-hati dalam menjalin kerjasama luar negeri khususnya kepada negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Setelah lama, Iran rupanya mampu untuk mengembangkan program nuklirnya dengan dalih program tersebut digunakan untuk kepentingan damai, padahal pada tahun 1980an menurut laporan intelijen, Iran sedang berupaya membuat senjata nuklir (Kerr, 2017). Sampailah pada tahun 2003 IAEA menemukan adanya niat lain dari Iran dalam mengembangkan program nuklir yang semula untuk tujuan damai menjadi untuk membuat senjata nuklir.

Kemudian pada saat bulan Februari tahun 2005 ketika Presiden Iran Muhammad Khatami mengumumkan melalui siaran televisi mengenai keberadaan fasilitas nuklir Natanz dan fasilitas nuklir lainnya. Presiden Muhammad Khatami juga secara resmi mengundang *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk melakukan kunjungan inspeksi ke fasilitas nuklir tersebut. Iran telah aktif melakukan kegiatan pengayaan uraniumnya dan telah mengembangkan teknologi pengayaan uranium sehingga Iran mampu melakukan pengayaan dengan maksimal. Semenjak saat itu, muncul laporan-laporan yang mengatakan bahwa Iran telah melanggar kesepakatan NPT dimana setiap negara hanya boleh memiliki maksimal 5% nuklir (uranium) sedangkan Iran telah berhasil mengayak sampai pada level 20%. Hal tersebut tentunya membuat negara-negara lainnya curiga dan tentunya membuat khawatir. Apalagi Israel yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, dimana negara tersebut secara geografis sangat berdekatan dengan Iran sehingga Israel dengan lobi-

lobinya berusaha memengaruhi negara lain untuk menghentikan aktifitas pengembangan nuklir Iran. Amerika Serikat sebagai negara *superpower* sangat konsen dengan tindakan Iran ini dan menyebut Iran menjadi ancaman dunia karena kepemilikan senjata nuklirnya. Dengan berbagai cara ia melakukan diplomasi-diplomasi dan melakukan embargo kepada Iran.

Berdasarkan beberapa laporan yang masuk, maka PBB mengeluarkan tiga resolusi yang berkaitan dengan program nuklir Iran. Yang pertama adalah melalui Resolusi 1696 tanggal 31 Juli 2006 (United Nation Security Council, 2006) yang berisikan tentang Iran yang harus meyakinkan kepada dunia bahwa nuklirnya memang untuk tujuan damai, melaporkan segala aktifitas yang berkaitan dengan program nuklir dan menghimbau kepada seluruh negara agar tidak membantu Iran. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2006 muncul resolusi kedua yaitu Resolusi 1737 (United Nation Security Council, 2006) yang masih berisi tentang himbauan penegasan atas Resolusi 1696 dan memberikan batas waktu 60 hari untuk menjalankan resolusi ini. Pada saat itu, Iran tetap tidak mau patuh kepada resolusi internasional tersebut.

Iran yang sudah dipimpin oleh Presiden Ahmadinejad tetap bersikeras melakukan pengayaan uranium tersebut dengan dalih tujuan damai. Oleh karenanya, PBB mengeluarkan Resolusi 1747 pada tanggal 24 Maret 2007 (United Nation Security Council, 2007) yang lebih berat kepada Iran yaitu pelarangan perdagangan senjata, permintaan agar negara memberlakukan larangan terhadap pihak-pihak yang terkait sanksi, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Kemudian muncul resolusi keempat nomor 1803 yang dikeluarkan oleh DK PBB pada tanggal 3 maret 2008 (United Nation Security Council, 2008) yang menuntut Iran untuk memenuhi tuntutan di resolusi terdahulu agar terciptanya kepercayaan dan membuktikan bahwa nuklir Iran didasari dengan tujuan damai.

Setelah melalui embargo dan upaya diplomasi yang sangat panjang, babak baru dimulai ketika perbincangan damai oleh negara P5+ 1 dimana akhirnya pada tahun 2009 Amerika Serikat masuk kedalam perbincangan tersebut. Meski masih terkena kendala Iran yang masih sangat keras kepala

dalam setiap perundingan. Pada tahun 2012 sebenarnya perundingan kembali dimulai, akan tetapi Iran masih bersikeras meskipun beberapa laporan menunjukkan adanya temuan sentrifugal baru di Natanz. Pertemuan yang dihelat pada bulan Mei 2012 pun juga tidak menghasilkan suatu keputusan yang nyata yang mampu merubah keadaan. Lewat beberapa serangkaian embargo minyak yang membuat ekspor minyak telah jatuh 40 persen dari tahun sebelumnya (Ajjah, 2012), dan dengan bergantinya kepemimpinan Ahmadinejad berganti dengan Presiden Hassan Rouhani, Iran dan negara-negara P5+1 mengadakan suatu perundingan damai Iran yang mulai intens kembali pada tahun 2014.

Amerika Serikat melakukan serangkaian diplomasi rahasia kepada Iran untuk segera mengakhiri perundingan ini dengan hasil yang menguntungkan kedamaian dunia. Pada September 2013 Barack Obama sebagai presiden Amerika Serikat melakukan perbincangan saluran telepon. Perbincangan ini menjadi suatu pertanda yang sangat bersejarah bagi kedua negara sejak tiga dekade. Setelah kejadian tersebut perbincangan menemui titik yang cukup menggembirakan meskipun dalam mencapai kesepakatan, Iran dan negara *superpower* dunia selalu terlambat dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun demikian, pada akhirnya, pada Juni 2015 Iran bersepakat untuk mau menuruti aturan yang telah ditetapkan dan menurunkan level pengayaan uranium menjadi terbatas dan mau untuk dibimbing penuh oleh negara-negara tersebut. Sanksi Iran dibuka kembali dan Iran dapat mulai kembali membangun perekonomiannya dan tentunya membuka keran ekspor minyak Iran yang selama ini terganggu.

Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Kerangka teori dalam sebuah karya ilmiah berperan sangat penting sebagai landasan berpikir yang jelas untuk membahas persoalan dan menarik sebuah kesimpulan pada persoalan tersebut. Pada kesempatan ini penulis akan menggunakan satu teori dari William D. Coplin untuk menganalisa isu yang ada pada karya ilmiah ini. Teori yang dimaksud adalah Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri yang dijelaskan oleh William D.

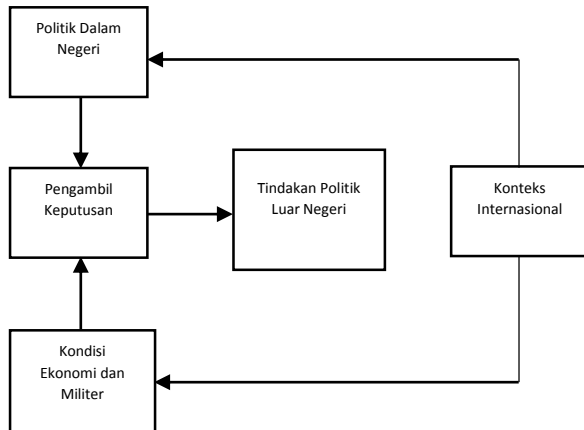
Coplin karena menurut penulis, teori ini mampu menjelaskan alasan suatu negara mengambil suatu kebijakan keputusan luar negeri tertentu. Menurut Coplin, sifat keputusan luar negeri ada tiga, keputusan luar negeri yang bersifat umum, administratif dan keputusan-keputusan yang bersifat krisis (Coplin, 1992).

Kebijakan keputusan luar negeri yang bersifat umum terdiri dari serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan dan tindakan langsung. Seringnya, politik luar negeri ini menyangkut pernyataan-pernyataan yang umum serta rencana yang bersifat menjaga kemungkinan. Selanjutnya, keputusan yang bersifat administratif adalah keputusan administratif yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibuat oleh anggota birokrasi yang memang bertugas melaksanakan hubungan luar negeri negaranya. Sedangkan keputusan-keputusan yang bersifat krisis merupakan kombinasi dari keduanya. Keputusan ini mampu memberikan dampak kepada kebijakan umum suatu negara serta dapat memperkuat kebijakan yang telah ada. Lebih spesifik lagi, keputusan krisis biasanya terbatas pada beberapa negara yang terlibat secara langsung dan biasanya terbatas pada tindakan mendesak yang harus direspon oleh para pembuat keputusan (Coplin, 1992).

Dengan melihat pemaparan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Iran adalah suatu tindakan yang bersifat krisis sehingga perlu adanya perubahan-perubahan untuk kemajuan negara Iran itu sendiri. Dampak dari sanksi betul-betul dirasakan oleh Iran yang membuat beberapa sektor meraskan ketidaknyamanannya sehingga diperlukan suatu tindakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi negara dalam mengambil keputusan juga telah dipaparkan oleh Coplin.

Dalam bukunya, Coplin menjelaskan tentang 3 konsideran yang mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks internasional. Dengan mengamati ketiga konsideran ini, nantinya dapat menjelaskan alasan politik luar negeri sebuah negara ditetapkan.

Gambar 1 Proses Pengambilan Keputusan William D. Coplin



Dilihat dari gambar di atas, dapat dinyatakan bahwa pengambil keputusan politik mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek: 1. Politik dalam negeri, 2. Kondisi ekonomi dan kondisi militer dan 3. Konteks internasional dalam membuat kebijakan. Oleh karena itu kita perlu untuk menggaris bawahi bahwa setiap konsideran hanya mempengaruhi secara parsial, sehingga setiap konsideran bukanlah faktor tunggal terhadap terbentuknya suatu kebijakan luar negeri.

1. Politik Dalam Negeri

Politik domestik membawa dampak besar terhadap politik luar negeri suatu negara. Perbedaan sistem pemerintahan yang dianut seperti demokratis atau autokrasi, terbuka atau tertutup merupakan keadaan dalam negeri yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Kemudian stabilitas negara serta kondisi dalam negeri menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Namun perlu diingat bahwa politik dalam negeri hanyalah seperangkat konsideran yang bekerja dalam perumusan politik luar negeri sebuah negara.

Coplin memfokuskan analisisnya pada hubungan antar para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor dalam negeri, yang berupaya mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Coplin memberikan istilah *policy influencers* bagi yang mempengaruhi kebijakan atau pengambil keputusan. Pengambil keputusan

menentukan kepentingan nasional, mengatur strategi dan membuat kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan.

Selanjutnya, Coplin mengategorikan *policy influencers* menjadi empat katagori yaitu, *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer* (Coplin, 1992). *Bureaucratic influencer* adalah berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan. Kemudian kelompok-kelompok birokratis menjadi sangat berpengaruh apabila mereka merupakan anggota dari pengambil keputusan. Tipe yang kedua adalah *partisan influencer*, mereka bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis, yaitu tuntutan-tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah.

Tipe yang ketiga adalah *interest influencers*, terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi dasar bagi aktivitas kelompok partai, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk mendapat dukungan dari pengambil keputusan yang lain. Yang terakhir adalah *mass influencers*, dalam hal ini mengacu pada iklim opini, yang dimiliki oleh populasi yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan pada saat menyusun politik luar negeri. Dampak *mass influencers* bisa beraneka ragam tergantung kepada sistem politik yang dianut suatu negara.

Dalam kasus perundingan nuklir Iran ini, Iran memiliki *bureaucratic influencers* yang sangat kental. Di Iran, konstelasi politik terbagi menjadi dua kubu, kubu yang pertama adalah kubu moderat dan yang kedua kubu konservatif/ garis keras (Khalaji, 2011). Perbedaan keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek salah satunya adalah aspek politik. Kubu moderat begitu mengapresiasi kebebasan sipil sedangkan kubu garis keras begitu menentang arus informasi dari luar (Holmquist, 2016). Pada bidang politik luar negeri, moderat mendukung politik *detente* dengan Barat sedangkan kubu konservatif sangat bersikap keras terhadap negara Barat

khususnya apabila berhubungan dengan Amerika Serikat. (Alhadar, 2017).

2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer dalam membuat kebijakan luar negeri mereka. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya ketika ia menyusun politik luar negeri. Pengambil keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer (Coplin, 1992).

Ekonomi dan militer merupakan kekuatan dalam negeri sebuah negara. Untuk menentukan suatu negara dapat dikatakan kuat dapat dilihat dari GNP, GNP per kapita dan neraca pembayaran suatu Negara menentukan hal tersebut. Untuk menentukan kuat dan lemahnya militer suatu negara dapat dilihat dari kapasitas penggunaan kekuatan militer negara tersebut, tingkat ketergantungan kepada negara lain serta kestabilan dalam negeri suatu negara.

Dalam hal ini dampak dari sanksi ekonomi yang diberikan kepada Iran sangatlah terasa. Sanksi yang diberikan oleh Barat yang meminta kepada negara-negara di dunia untuk menjauhi perekonomian Iran membuat perekonomian Iran menjadi tidak stabil (MACALUSO, 2014). Setelah kejadian-kejadian tersebut, PBB, Uni Eropa dan tentunya Amerika Serikat yang juga memiliki andil dalam pemberian sanksi kepada Iran, melakukan embargo ekonomi yang membuat nilai tukar rial Iran menjadi tidak berharga dibandingkan dengan dolar (BBC, 2012).

Jelas sekali bahwa embargo yang dilakukan oleh mereka sangat berdampak kepada Iran apalagi salah satu hal yang diembargo oleh dunia internasional pada saat itu adalah melakukan pelarangan jual beli minyak mentah Iran yang merupakan komoditas ekspor andalan yang dimiliki oleh Iran. Pada tahun 2012 1 dollar Amerika Serikat dihargai 20000 rial Iran. Sementara, pada tahun 2013, beberapa bulan setelah sanksi dilakukan, nilai mata uang rial menjadi 36000 rial untuk 1 dolar Amerika Serikat (Nikaen, 2013). Apalagi, potensi pendapatan yang mampu Iran dapatkan bila tidak disanksi jumlahnya sangat besar sehingga turut

mengganggu kestabilan keuangan negara Iran.

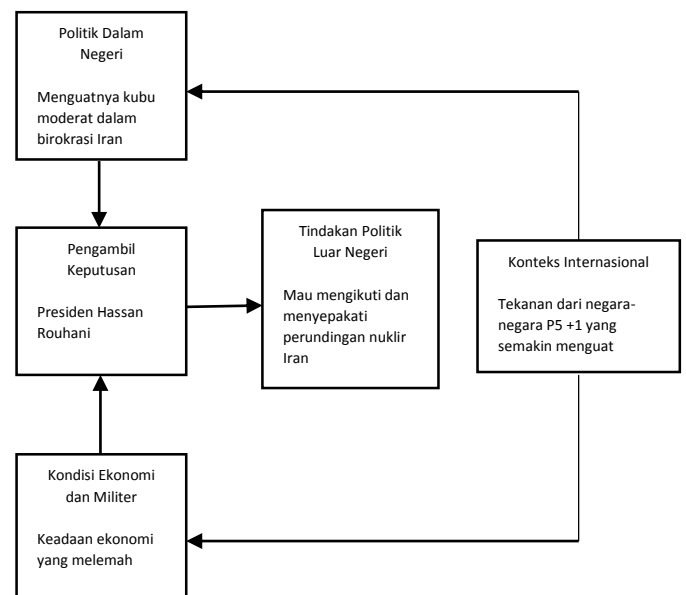
3. Konteks Internasional

Konteks internasional merupakan aspek penting dalam membuat keputusan, terlebih menyangkut hubungan dengan negara lain. Coplin menyebutkan bahwa konteks internasional dapat merubah dan mempengaruhi kebijakan suatu negara, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Coplin menyatakan ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara-negara itu dengan negara-negara lain.

Embargo yang dilakukan oleh dunia internasional semata-mata ingin membuat Iran menyerah dalam ambisi program nuklirnya dan tentunya menekan Iran untuk berdialog demi tercapainya keamanan dunia.

Gambar 2 Interaksi antar Faktor dalam Proses Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri



Alasan Iran Bersedia Untuk Berunding Dengan Negara-Negara P5 + 1

Pada bab yang lalu telah dijelaskan mengenai kondisi dalam negeri Iran yang memiliki tambang minyak, tambang gas alam dan tentunya tambang uranium yang siap untuk diayak. Dari kepemilikan berbagai sumber daya alam inilah Iran memiliki kondisi perekonomian yang baik dan melakukan program pengembangan nukir Iran yang baik, dimana kemudian muncul adanya hadangan dari negara-negara Barat yang mengganggu stabilitas dalam negeri Iran. Setelah melalui berbagai peristiwa dan negosiasi yang panjang, akhirnya Iran menyetujui untuk berunding dengan Iran. Pada bab ini penulis akan menjabarkan apa saja yang mendasari Iran untuk menyetujui berunding dengan negara P5 + 1 sesuai dengan teori pengambilan keputusan luar negeri yang dijelaskan oleh William D. Coplin.

A. Politik Dalam Negeri Iran

Menguatnya kubu moderat dalam birokrasi Iran pasca menurunnya angka kredibilitas kubu kiri di mata rakyat Iran akibat kegagalan mereka memenuhi janji-janji reformis. Kendati rakyat Iran tidak memungkiri realitas bahwa kubu kanan yang menguasai pilar-pilar kekuatan negara menjadi faktor penghalang terealisasinya program-program reformis, namun rakyat tetap memandang bahwa kubu kiri telah gagal memenuhi aspirasi rakyat yang menginginkan perubahan. Bahkan, seandainya Dewan Garda membatalkan diskualifikasi ribuan kandidat reformis, mereka tidak secara otomatis akan memilih kembali kandidat reformis. Tanda-tanda melemahnya dukungan terhadap reformis juga tampak dalam aksi unjuk rasa para mahasiswa Juni 2003, yang mulai berani menuntut agar Presiden Khatami yang notabene sebagai inspirator gerakan reformis mengundurkan diri karena dinilai lemah menghadapi kubu kanan konservatif (Musthafa, 2003).

Selain itu, terjadinya perpecahan dalam barisan kubu kiri yang terlihat sebelum pemilu parlemen ke-7, tepatnya ketika pemilihan walikota pada 28 Februari 2003 lalu di mana kubu kiri ternyata maju dengan berbagai bendera, tidak lagi di bawah satu bendera yang sama.

Akibatnya, secara mengejutkan kubu kanan memenangkan pemilihan wali kota tersebut. Kubu Al Thani Al Khordad yang selama ini menjadi payung semua faksi kiri beraliran reformis dianggap tidak relevan lagi menjadi wadah politik bagi semua faksi kiri. Faksi kiri radikal, khususnya Front Partisipasi Islam (IIPF) yang secara terang-terangan menggugat sistem *Velayat-e Faqih* kini dianggap menjadi beban politik Al Thani Al Khordad dan dalam pemilu parlemen kali ini, kubu kiri diwakili oleh *Coalition for Iran* yang memayungi delapan kelompok reformis yang tidak turut serta memboikot pemilu.

Ketidakkompakan kubu reformis pun diakui oleh Mohammad Reza Khatami yang turut serta dalam aksi boikot bahwa masalah utama yang dihadapi gerakan reformasi saat ini adalah kurangnya organisasi dan partai yang kuat. Oleh karena itu langkah keluar dari Majelis dan keluar dari pusat kekuasaan merupakan kesempatan bagi reformis untuk melakukan reorganisasi partai (Ray, 2003).

Berubahnya kondisi politik dalam negeri Iran ditandai dengan keinginan kubu kanan menguasai kembali lembaga legislatif dan eksekutif. Kubu kanan sangat cemas melihat terus meningkatnya pengaruh kubu kiri dalam kehidupan politik Iran dewasa ini. Keberhasilan kubu kiri menguasai lembaga eksekutif dan legislatif dan senantiasa mendengungkan reformasi ke telinga rakyat melalui corong media massa, membuat kubu kanan mengambil langkah keras demi meredam langkah reformis yang mereka anggap membahayakan kelestarian ideologi revolusi islam. Kubu kiri pula yang menggulirkan isu normalisasi hubungan dengan AS, yang bagi kubu kanan merupakan sebuah isu yang tabu untuk dibicarakan. Sehingga kubu kanan terus membangun opini bahwa kontak dengan AS dapat mengancam eksistensi Republik Islam Iran dan peran kaum Mullah di Iran. Sikap kubu kanan ini terlihat tatkala Ayatollah Jannati, Ketua Dewan Garda, menegaskan bahwa meski Iran bersedia menerima bantuan kemanusiaan dari AS atas musibah gempa bumi di kota Bam, namun hal itu bukan berarti hubungan

kedua negara otomatis membaik. Oleh karena itulah, penting bagi kubu kanan untuk menguasai kembali lembaga legislatif demi memuluskan jalan bagi kandidat konservatif memenangkan pemilu presiden di tahun mendatang. Hal ini sangat memungkinkan mengingat masa jabatan dan kesempatan Mohammad Khatami menjadi presiden akan berakhir. Di samping itu tidak ada kandidat kubu kiri yang kuat selepas Khatami. Sementara itu, kubu kanan telah menyiapkan calon kuatnya untuk pemilu presiden 2005, yakni Dr. Mir Husein Musavi (mantan PM Iran di era 1980-an) yang bukan dari kalangan Mullah dan tampaknya hal ini mengindikasikan bahwa kaum mullah konservatif secara perlahan mulai menarik diri dari panggung politik Iran, agar tidak terlihat secara frontal menguasai posisi-posisi strategis meski secara ril politik mereka tetap sebagai “penguasa” di belakang layar. Sikap kubu kanan yang kini juga mengangkat slogan-slogan reformasi, khususnya reformasi di bidang ekonomi yang selama ini bukan menjadi prioritas utama kubu kiri. Selama tujuh tahun terakhir, kubu kiri lebih memprioritaskan reformasi politik ketimbang ekonomi.

Sementara itu, kaum muda dan kalangan menengah kota telah mengalami frustrasi akibat kondisi ekonomi yang stagnan dan jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Realitas inilah yang kemudian digarap oleh kubu kanan dan menjadi slogan reformasi mereka dalam kampanye pemilu dengan menggunakan nama Abadgaran atau Koalisi untuk Pembangunan Iran Islami (*the Coalition on Developers of Islamic Iran*) (kartini, 2004). Dengan slogan tersebut, kubu kanan mencoba meyakinkan rakyat agar mengesampingkan pertikaian faksional dan memberi kesempatan bagi pemerintah untuk kembali bekerja dan tampaknya strategi kubu kanan pun membawa hasil yang signifikan terbukti dengan kemenangan mereka dalam pemilu wali kota dan pemilu parlemen pada 2004.

Kekalahan kubu kiri dalam pemilu parlemen kali ini tentu saja mengakibatkan terjadinya pergeseran kekuatan dalam peta politik Republik Islam Iran. Realitas politik Iran tujuh tahun belakangan ini

menunjukkan kekuatan kubu kiri mulai mengimbangi kekuatan kubu kanan dengan dikuasainya lembaga eksekutif dan yudikatif. Namun, saat ini peta politik Iran kembali diwarnai oleh dominasi kubu kanan (pragmatis) di setiap pilar pemerintahan Republik Islam Iran. Realitas ini tentu saja mengundang kekhawatiran tidak hanya publik Iran tapi juga dunia internasional. Akankah Republik Islam Iran kembali menampilkan “wajah garangnya” seperti masa Imam Khomeini dan membawa Iran kembali terisolasi dari dunia internasional? Kendati kekhawatiran tersebut cukup beralasan, namun tampaknya kita tidak bisa menafikan adanya angin perubahan di republik Islam sepeninggal Pemimpin Besar revolusi Islam Imam Khomeini, khususnya semenjak Ali Akbar Hashemi Rafsanjani menjadi presiden hingga masa Khatami saat ini.

Doktrin reformasi yang dikampanyekan Khatami bersama kubu kiri juga telah mempengaruhi pemikiran kubu kanan. Sehingga dapat diungkapkan bahwa pemikiran reformis telah diterima oleh bangsa Iran secara luas, termasuk kalangan konservatif. Realitas ini disadari penuh oleh kubu kanan, sehingga anggota parlemen dari kubu kanan yang terpilih dalam pemilu parlemen ke-7 menegaskan bahwa mereka akan berusaha sebaik-baiknya untuk bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Khatami di mana Khatami diyakini tetap membawa pengaruh moderasi di kalangan konservatif (kartini, 2004).

Bahkan, banyak kalangan yang meyakini bahwa kubu kanan telah memberi sinyal positif dan menunjukkan itikad baik untuk menjadi bagian dari komunitas internasional. Hal ini sangat penting mengingat dalam kampanye pemilu parlemen ke-7, mereka menjanjikan reformasi ekonomi khususnya menciptakan lapangan kerja bagi ribuan kaum muda Iran, keadilan sosial dalam hal pemberantasan korupsi, serta kebebasan politik khususnya di lingkungan universitas sekaligus menepis rumor bahwa parlemen baru yang terbentuk justru akan mengekang kebebasan politik. Mengingat kemajuan ekonomi menjadi agenda utama pemerintahan kali ini, maka

itu berarti pemerintah Iran membutuhkan investasi besar yang mustahil dilakukan tanpa bantuan investasi asing. Sehingga bukan tindakan yang bijaksana apabila pemerintah Iran saat ini mengasingkan diri dari komunitas internasional (Kartini, 2004).

Oleh karena itu harapan rakyat Iran saat ini digantungkan kepada sayap kanan konservatif yang lebih moderat, pragmatis, berpendidikan, dan profesional, maupun sayap kanan reformis yang kemungkinan besar dapat muncul sebagai kekuatan politik baru, yakni kelompok tengah yang diharapkan mampu menyelamatkan gerakan reformasi di Iran. Tanpa menafikan besarnya peran revolusi Islam bagi bangsa Iran, tentunya kembali ke masa revolusi bukanlah pilihan rasional bagi bangsa Iran saat ini. Karena dalam evolusi kehidupan demokrasi di Iran saat ini, bangsa Iran berada pada "point of no return" dimana reformisme merupakan pemikiran sekaligus gerakan masa depan Iran yang tentunya diharapkan mampu mengurangi bahkan menghapus disilusi rakyat Iran (Kartini, 2004).

Dampak besar dari berubahnya sistem politik di Iran terjadi ketika Hassan Rouhani terpilih sebagai presiden Iran pada 2013, Rouhani dengan latar belakang pendidikan barat dan berupaya mengembalikan kepercayaan AS dan negara Uni Eropa mengenai program nuklir Iran. Rouhani memulai dengan melakukan diplomasi terhadap dunia internasional mengenai program nuklir Iran pada sidang umum PBB tahun 2013 (Kurnia, 2016).

Rouhani dengan idiosinkratik yang lemah lembut dan kebabakan mampu menyampaikan poin-poin dan posisi Iran dengan cara yang sangat diplomatis, dengan isi yang tetap konsisten akan tujuan yang ingin dicapai Ahmadinejad yaitu menunjukkan posisi kontra terhadap zionisme, khususnya Israel dalam mengatur agenda Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk menjatuhkan sanksi-sanksi ekonomi sebagai bentuk hukuman atas Iran yang mengembangkan teknologi nuklir. Ia sangat menyayangkan tindakan ekonomi koersif dan berbagai kebijakan militer lainnya terhadap Iran. Namun hal-hal ini ia

sampaikan tanpa membuat Israel tersudutkan dengan tindakan-tindakan koersif-verbal seperti yang dilakukan Ahmadinejad dengan mengutip perkataan Ayatollah Khomeini untuk menghapuskan Israel dari peta dunia. Sekalipun Rouhani tidak pernah menyebutkan kata Israel dalam pidatonya. Ia sangat menjunjung nilai-nilai perdamaian seperti yang dipaparkan dalam pidatonya seperti berikut:

"Iran seeks to resolve problems, not to create them. There is no issue or dossier that cannot be resolved through reliance on hope and prudent moderation, mutual respect, and rejection of violence and extremism. Iran's nuclear dossier is a case in point. As clearly stated by the Leader of the Islamic Revolution, acceptance of the inalienable right of Iran constitutes the best and the easiest way of resolving this issue. This is not political rhetoric. Rather, it is based on a profound recognition of the state of technology in Iran, global political environment, the end of the era of zero-sum games, and the imperative of seeking common objectives and interests towards reaching common understanding and shared security" (Kurnia, 2016).

Dalam posisi strategi diplomatik Iran dibawah Menlu Javad Zarif, Iran mengupayakan sebuah dialog internasional yang dilakukan melalui PBB sebagai wadah multilateral dan dengan sasaran negara-negara P5 + 1 yang meliputi Perwakilan Uni Eropa, Amerika Serikat, Jerman, China, Perancis, Inggris dan Rusia serta Iran juga mengumpulkan kekuatan melalui memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara yang memiliki posisi yang sama akan pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai. Hal ini terbukti signifikan dengan kualitas performa diplomatik Javad Zarif dan Hasan Rouhani yang memiliki kesepihakan visi dalam upaya diplomasi nuklir Iran, Rouhani berhasil memperjuangkan hak-hak pengembangan teknologi nuklir Iran dan menurunkan sanksi ekonomi yang diberikan oleh negara P5+1 melalui *Joint of Action of Geneva Interim Agreement on Iran*

Nuclear Program pada tanggal 20 November 2013 setelah sebelumnya melakukan negosiasi di tanggal 7 dan 8 November 2013 di Jenewa (Kurnia, 2016). Perjanjian ini mencakup pemenuhan syarat yang diberikan negara P5+1 kepada Iran untuk mendapatkan hak pengembangan nuklirnya meliputi, program nuklir Iran harus diawasi ketat komunitas internasional, Iran harus menghentikan pengayaan uranium, dikurangnya stok bahan nuklir Iran dan ditutupnya fasilitas nuklir Iran di wilayah Arak. Sebagai timbal baliknya untuk Iran, sanksi ekonomi yang terdahulu pernah diterapkan akan diganti rugi sebanyak US\$ 7 Miliar dan jaminan tidak akan dijatuhkannya sanksi ekonomi kembali kepada Iran. Perjanjian interim ini akan berlangsung pada 6 bulan terakhir ini untuk melihat perkembangan komprehensif dari perkembangan nuklir Iran dan pengaruhnya pada dinamika internasional. Perjanjian ini pun memberikan izin kepada Iran untuk lepas dari sanksi di sektor *auto-industry* dan izin instalasi suku cadang untuk keamanan penerbangan sipil Iran pun sudah dikeluarkan oleh dunia internasional. Iran merespon terhadap permintaan non-proliferasi nuklir dengan jaminan penurunan pengayaan uranium sebesar 20% dalam waktu satu sampai dua bulan ini. Perihal instalasi di Arak tidak akan ditingkatkan kapabilitasnya namun konstruksi pembangunan akan tetap diteruskan dan hasil negosiasi ini disepakati oleh seluruh pihak. Sekalipun mendapatkan berbagai kecaman dari Israel khususnya karena penolakan atas realitas bahwa dunia Barat, bahkan Amerika Serikat, sudah melunak dengan diplomasi Rouhani, kesepakatan ini tetap diterapkan per 20 Januari 2014 (Kurnia, 2016).

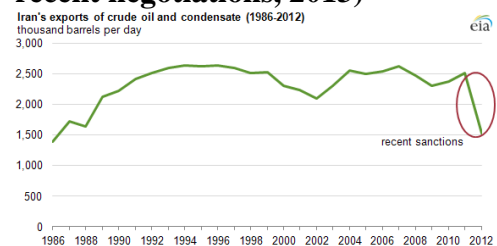
B. Keadaan Ekonomi Iran Sesudah Embargo

Setelah mendapatkan beberapa sanksi ekonomi baik dari UN, EU, dan AS ekonomi Iran berada dalam posisi yang buruk dimana penurunan dari pendapatan negara, meningkatnya angka inflasi hingga meningkatnya angka pengangguran di Iran yang mengakibatkan terjadinya demo di ibukota Iran Teheran. Sebelum sanksi atas

program nuklir Iran, negara tersebut menduduki peringkat kedua dengan tingkat perekonomian tersebesar di Timur-Tengah dan Afrika Utara dengan GDP yang mencapai US\$ 598 miliar pada tahun 2012 meskipun perekonomian Iran hanya bergantung pada minyak dan gas yang menyumbang hampir 50 persen pendapatan negara dan 74 persen dari ekspor pada 2010 (Ilias, 2010).

Kemudian saat AS dan EU memperketat sanksi terhadap Iran dengan mengincar sektor minyak Iran yang mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor tersebut, pada tahun 2011 pendapatan Iran dari ekspor minyak berjumlah 95 miliar dolar dan menurun pada tahun 2012 menjadi 69 miliar dolar. Hal ini memiliki pengaruh yang besar terhadap ekonomi Iran yang mana ekspor minyak menyumbangkan 80 persen pendapatan ekspor Iran dan 50 persen pendapatan negara. Selain itu, sanksi juga mempengaruhi investasi di sektor minyak dimana banyaknya pembatalan-pembatalan proyek baru oleh beberapa perusahaan asing pada pertengahan 2011 dan 2012 (EIA, sanctions reduce Iran's oil export and revenues in 2012, 2013).

Bagan 1 Ekspor Minyak Iran (EIA, Iran's oil exports not expected to increase significantly despite recent negotiations, 2013)

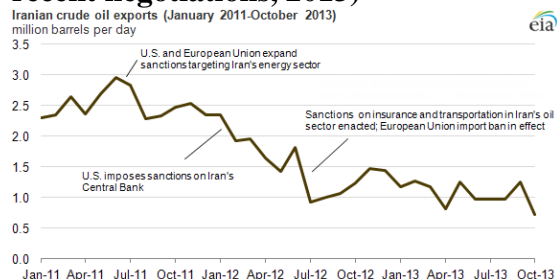


Dari bagan diatas, dapat dilihat bahwa dengan berlakunya sanksi ekonomi bagi Iran berpengaruh terhadap angka ekspor minyak Iran dimana angka tersebut berada pada titik terendah sejak tahun 1986 pada tahun 2012.

Selanjutnya angka produksi dan ekspor minyak Iran juga terus mengalami kemunduran hingga akhir tahun 2013 dimana produksi minyak Iran hanya berada di angka 2,8 juta barel per hari dan ekspor minyak mentah hanya sebesar 1,1

juta barel per hari (EIA, Iran's oil exports not expected to increase significantly despite recent negotiations, 2013).

Bagan 2 Ekspor Minyak Iran (EIA, Iran's oil exports not expected to increase significantly despite recent negotiations, 2013)



Kemudian angka dari produksi dan Ekspor minyak Iran juga mengalami penurunan sejak sanksi dari dunia internasional terhadap Iran berlaku dari bulan juli 2011 sampai juni 2012 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2013 ke angka 0,5 juta barel per hari.

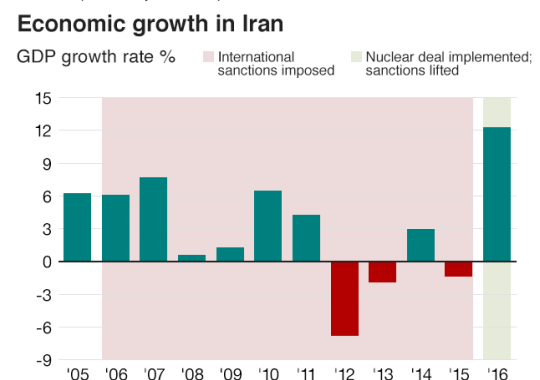
Selain menurunnya produksi dan ekspor minyak Iran setelah adanya sanksi ekonomi, angka pembelian minyak oleh negara pembeli utama juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari total pembelian 2,5 juta barel per hari pada tahun 2011 menjadi 1,27 juta barel per hari pada tahun 2012 (Widya fitri, 2013).

Tabel 1 Pembeli Minyak Iran (Widya fitri, 2013)

No	Negara/Blok	2011	2012
1	Uni Eropa (Italia, Spanyol, dan Yunani)	600.000	Diabaikan
2	Cina	550.000	380.000
3	Jepang	325.000	170.000
4	India	320.000	28.000
5	Korea Selatan	230.000	180.000
6	Turki	200.000	150.000
7	Afrika Selatan	80.000	0
8	Malaysia	55.000	30.000
9	Srilangka	35.000	20.000
10	Taiwan	35.000	20.000
11	Singapura	20.000	15.000
12	Lainnya	55.000	25.000
	Total	2,5 juta	1,27 juta

Dengan menurunnya angka produksi dan ekspor minyak Iran berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara Iran, setelah beberapa sanksi dari AS dan EU mengincar sektor minyak Iran, pendapatan negara Iran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Angka pertumbuhan ekonomi Iran berada pada titik terendah pada tahun 2012 dan 2013 (BBC, 2018).

Bagan 3 Pertumbuhan Ekonomi Iran (BBC, 2018)



Source: Central Bank of Iran

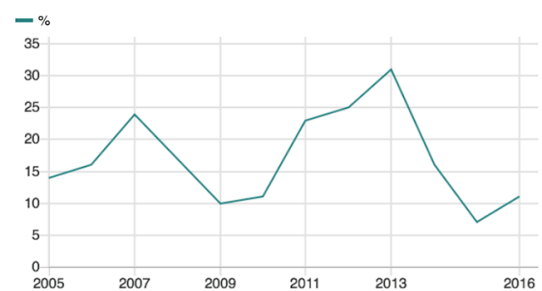
BBC

Kemudian ekonomi Iran semakin memburuk dengan meningkatnya angka inflasi pada 2013 yang mencapai 31 persen yang membuat mata uang Iran terdevaluasi lebih dari 450 persen (BBC, 2018).

Bagan 4 Angka Inflasi Iran (BBC, 2018)

Kenaikan harga-harga di Iran

Rata-rata inflasi berfluktuasi tajam dan berada di atas 10%



Sumber: Bank Sentral Iran

BBC

Dari tabel tersebut terlihat bahwa angka inflasi kemudian menurun pada 2015 dengan adanya beberapa negosiasi yang dilakukan dengan dewan keamanan PBB dalam masalah pengayaan uranium di Iran. Dengan tingkat inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, mengakibatkan kenaikan dari angka pengangguran di Iran. Angka

3. Memfasilitasi transaksi yang signifikan atau memberikan jasa keuangan yang signifikan untuk IRGC atau agen yang memiliki properti dan kepentingan di bawah blokir *International Emergency Economic Power Act* (IEEPA) atau lembaga keuangan yang memiliki properti dan kepentingan yang berada di bawah blokir IEEPA dan berhubungan dengan proliferasi WMD Iran atau sistem pengiriman untuk WMD atau mendukung Iran untuk terorisme internasional (treasurygov, 2010).

Selanjutnya poin ketiga dari CISADA membahas mengenai pencegahan pengiriman, re-eksporasi, atau pengalihan barang-barang sensitif ke Iran. Pelarangan ini melingkupi barang-barang yang berasal dari AS yang dikirim ke pengguna akhir di Iran yang identitasnya tidak dapat diverifikasi atau ke entitas di Iran yang melanggar hukum atau peraturan AS, termasuk dengan pengiriman melalui satu atau lebih negara asing atau menggunakan informasi palsu mengenai negara asal. Kemudian mengatur tentang pelaporan wajib oleh Direktur Intelijen Nasional AS untuk mengidentifikasi negara-negara yang sensitif mengirimkan teknologi AS secara ilegal ke Iran (treasurygov, 2010). Bagian ini mengandalkan kinerja departemen perdagangan untuk melakukan kontrol dan monitor perdagangan terhadap volume barang-barang dari AS yang berakhir pada penerima yang tidak teridentifikasi, ketidaktepatan ekspor dan reekspor dan keengganan atau ketidakmampuan suatu negara untuk bekerjasama dengan AS dalam merespon isu pengalihan kontrol ekspor (treasurygov, 2010).

Bagian terakhir dari CISADA hanya menjelaskan mengenai tanggal berlakunya CISADA yang mulai berjalan 120 hari setelah tanggal berlakunya undang-undang ini dan berakhirnya CISADA adalah 30 hari setelah tanggal dimana presiden menyatakan kepada kongres bahwa pemerintah Iran telah berhenti mendukung tindakan terorisme internasional dan tidak lagi memenuhi persyaratan tertentu untuk penunjukan

sebagai negara yang mendukung terorisme dan Iran telah berhenti melakukan akuisisi, dan pengembangan senjata nuklir, kimia, biologi dan balistik (treasurygov, 2010).

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan Iran untuk melakukan diplomasi mengenai program nuklirnya, faktor ekonomi dianggap penulis sebagai salah satu faktor yang paling utama dimulainya diplomasi tersebut terutama setelah beberapa sanksi dari dunia internasional mengarah kepada sektor minyak Iran yang kemudian berdampak signifikan terhadap produksi dan ekspor minyak Iran terhadap beberapa negara pembeli utama. Meskipun tekanan-tekanan datang dari dewan keamanan PBB, EU dan AS, dukungan akan program nuklir Iran didapat dari negara-negara non-blok dan China dimana ketika sanksi ekonomi berlaku, China merupakan salah satu negara yang konsisten melakukan impor minyak dari Iran.

Dukungan juga didapatkan Iran dari negara-negara non-blok setelah berhasil mengelenggarakan KTT non-blok yang kemudian menjadikan Iran sebagai ketua untuk periode 2012-2015. Kemudian dalam KTT tersebut menghasilkan Deklarasi Teheran yang didalamnya termasuk dukungan dari negara anggota non-blok terhadap program nuklir Iran yang selama ini dianggap untuk kepentingan damai, sehingga secara tidak langsung melalui KTT tersebut Iran mendapatkan sedikit dukungan terhadap program nuklirnya (MEA, 2012).

Kesepakatan nuklir Iran dengan dewan keamanan PBB terjadi pada tahun 2014 di Wina Austria, dimana isi dari kesepakatan tersebut banyak menguntungkan Iran sendiri dengan pencabutan beberapa sanksi ekonomi, migas, petrokimia, perdagangan dan transportasi yang diterapkan oleh EU dan AS dicabut sekaligus. Selain itu, fasilitas nuklir Iran tetap dipertahankan dan tidak satupun sentrifugal yang disingkirkan. Aktivitas penelitian dan pengembangan semua sentrifugal utama dan mutakhir tetap dilanjutkan termasuk R-4, IR-5, IR-6 dan IR-8. Kemudian, embargo senjata terhadap Iran juga dicabut dan diganti menjadi pembatasan dimana Iran diperkenankan

untuk mengimpor atau mengekspor sebagian produk senjata (Muhammad, 2015).

Selain tekanan dari AS sendiri, Iran mendapatkan tekanan-tenakan dari negara-negara anggota dewan keamanan PBB yaitu atau p5+1 melalui beberapa resolusi yang memberatkan Iran dimana salah satunya yaitu pemutusan hubungan nuklir Jerman dan Prancis dengan Iran dengan menghentikan pasokan uranium untuk Pusat Penelitian Nuklir Iran (TNRC).

AS dan negara sekutunya terus menghembuskan isu-isu bahwa proyek nuklir sipil Iran hendak diblokkan menjadi proyek senjata nuklir. Meskipun tim inspeksi IAEA mengatakan bahwa tidak ada penyimpangan sedikitpun dari proyek nuklir Iran (Bahgat, 2006). Hal ini senada dengan pernyataan yang ditulis oleh Gawdat Bahgat dalam artikelnya yang berjudul “*Nuclear Proliferation: The Islamic Republic of Iran*”:

“Since the mid-1980s, Israel, the United States, and other Western powers have accused that Iran of pursuing nuclear weapons capability. Iranian officials have categorically denied these accusations and claimed that their nuclear program is designed for civilian purposes, not military ones. These accusations and denials have further intensified since the earlier 2000s with the revelation of previously unknown nuclear activities by the Iranian authority” (Bahgat, 2006).

Kemudian negara-negara P5+1 yang merupakan anggota dari dewan keamanan PBB mengecam dan menentang program nuklir Iran melalui beberapa resolusi yang dibentuk. Resolusi pertama yaitu Resolusi 1696 yang dibentuk pada 2006 berisi tentang upaya yang harus dilakukan Iran untuk meyakinkan bahwa nuklirnya memang untuk tujuan damai, melaporkan segala aktivitas, dan menghimbau kepada seluruh negara untuk tidak membantu Iran. Iran sempat mengabaikan sanksi resolusi pertama, yakni Resolusi 1696, dengan tidak melaporkan keseluruhan aktifitas pengembangan nuklirnya dan menganggap resolusi tersebut ilegal yang menyebabkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan

sanksi selanjutnya berupa Resolusi 1737 pada Desember 2006 yang berisi tentang himbauan penegasan atas resolusi sebelumnya kepada Iran dengan batas waktu bagi Iran untuk melaksanakan isi dari resolusi ini adalah 60 hari dan melarang perdagangan dengan Iran dalam berbagai bidang yang berkontribusi terhadap nuklirnya serta pembatasan lawatan dan pembekuan aset beberapa pejabat terkait program nuklir dan misilnya.

Tekanan terhadap program nuklir Iran berlanjut pada tahun 2007 melalui Resolusi 1747 dewan keamanan PBB yang berisi tentang jatuhnya sanksi yang lebih berat kepada Iran yaitu larangan dan pembatasan terhadap Iran terkait jual-beli senjata dan peralatan militer lainnya, pembatasan kunjungan dan pembekuan aset beberapa lembaga dan pejabat Iran, dan seruan untuk tidak membuat komitmen keuangan dengan Iran serta tentang insentif untuk Iran apabila mematuhi warning dan seruan PBB dan IAEA.

Resolusi 1803 dan 1835 berisi tentang tuntutan kepada Iran untuk memenuhi tuntutan dari resolusi-resolusi dewan keamanan PBB sebelumnya demi membangun kepercayaan dan membuktikan bahwa program nuklir Iran didasari dengan tujuan damai (Kholil, 2014).

KESIMPULAN

Iran yang merupakan salah satu negara di Timur-Tengah memiliki wilayah yang sangat strategis diapit oleh dua benua besar dan memiliki perbatasan yang begitu beragam. Hal ini membuat apa yang terjadi di dalam negeri Iran dapat mempengaruhi peta politik dunia. Sebagai salah satu contohnya adalah adanya perundingan nuklir Iran yang terjadi antara negara-negara anggota P5 + 1 dengan Iran yang diawali oleh kecurigaan negara-negara Barat terhadap program pengembangan nuklir yang dimiliki oleh Iran. Adapun pada awalnya adalah pada saat 2003 IAEA membuat laporan tentang Iran setelah inspeksi ke fasilitas Natanz dan menemukan adanya potensi yang dapat

membahayakan dunia. Mulai pada saat itu, Iran mendapatkan ujian-ujian dari luar negeri terhadap kepemilikan program nuklir tersebut.

Bahkan, Iran mendapatkan beberapa kali sanksi dari PBB dan juga dari Amerika Serikat yang sangat menekan Iran untuk menghentikan program pengembangan nuklir Iran tersebut. Yang pertama adalah melalui Resolusi 1696 tanggal 31 Juli 2006 (United Nation Security Council, 2006) yang berisikan tentang Iran yang harus meyakinkan kepada dunia bahwa nuklirnya memang untuk tujuan damai, melaporkan segala aktifitas yang berkaitan dengan program nuklir dan menghimbau kepada seluruh negara agar tidak membantu Iran. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2006 muncul resolusi kedua yaitu Resolusi 1737 (United Nation Security Council, 2006) yang masih berisi tentang himbauan penegasan atas Resolusi 1696 dan memberikan batas waktu 60 hari untuk menjalankan resolusi ini.

Oleh karena Iran tetap tidak mau melakukan apa yang DK PBB inginka, DK PBB mengeluarkan Resolusi 1747 pada tanggal 24 Maret 2007 yang lebih berat kepada Iran yaitu pelarangan perdagangan senjata, permintaan agar negara memberlakukan larangan terhadap pihak-pihak yang terkait sanksi, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Kemudian muncul resolusi keempat nomor 1803 yang dikeluarkan oleh DK PBB pada tanggal 3 maret 2008 (United Nation Security Council, 2008) yang menuntut Iran untuk memenuhi tuntutan di resolusi terdahulu agar terciptanya kepercayaan dan membuktikan bahwa nuklir Iran didasari dengan tujuan damai.

Selama sanksi-sanksi tersebut dilancarkan, Iran tetap bersikeras dan menolak setiap tuduhan yang disangkalkan kepada Iran. Tentunya, adanya sanksi dapat membuat Iran mengalami perubahan ekonomi dan juga membuat perubahan kondisi politik dalam negeri mereka akibat adanya perbedaan pendapat mengenai program pengembangan nuklir Iran. Meskipun demikian, setelah terpilihnya presiden Rouhani pada tahun 2013, akhirnya Iran mulai melunak dan pada saat itulah perundingan nuklir Iran mulai intens dilakukan.

Dari penelitian ini penulis menemukan beberapa fakta tentang alasan Iran ingin melakukan perundingan dengan negara-negara P5 + 1, adapun penemuan penulis tentang hal tersebut adalah:

1. Kondisi perpolitikan yang ada di dalam negri iran mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin luntuhnya pengaruh kubu konservatif di lembaga eksekutif maupun parlemen sehingga para pembuat kebijakan yang berasal dari kaum reformis mampu untuk melakukan perubahan yang berbeda seperti yang telah kaum konservatif tunjukkan.

2. Menurunnya kondisi ekonomi yang ada di Iran mampu mempengaruhi pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan sesegera mungkin yang dianggap dapat memajukan perekonomian iran.

3. Tekanan internasional yang begitu masif dilancarkan kepada iran nyatanya mampu untuk menjadi faktor perubah keadaan para pembuat kebijakan di Iran.

Maka dari ini penulis melihat bahwa Iran telah menghadapi tekanan yang cukup kuat sehingga terkait program pengembangan teknologi nuklirnya sehingga Iran menjatuhkan pilihan unyuk melunak terhadap negara-negara P5 + 1 demi menstabilkan kondisi ekonomi politik dalam negri yang terpuruk akibat banyaknya sanksi yang diterima.

Daftar Pustaka

Buku:

Alcaff, M. (2008). *Perang Nuklir? Militer Iran*. Zahra Publishing House

Abrahamian, E. (2008). *A history of Modern Iran*. New York City: Columbia University Press.

Coplin, W. D. (1992). *Suatu Telaahan Teoritis*. Bandung: CV. Sinar Baru.

Holmquist, E. (2016). *Iran After the Deal*. stockholm: The Swedish Ministry of Defence.

Kerr, P. K. (2017). *Iran's Nuclear Program: Status*. Washington, D.C., U.S.: Congressional Research Service.

Khalaji, M. E. (2011). *Nuclear Fatwa: Religion and Politics in Iran's Proliferation Strategy*. Washington: The Washington Institute for Near East Policy.

Rahman, Mustafa. Abd. (2003). *Iran pasca revolusi: fenomena pertarungan kubu reformis dan konservatif*.

Jurnal:

David Albright, J. S. (2009). Is Iran Running out of Yellowcake? Washington DC: Institute for Science and International Security

Ilias, S. (2010). Iran's economic Conditions: U.S. Policy Issues. Congressional Research service, 41.

International Atomic Energy Agency. (1993). *The Annual Report for 1992*. Wina: International Atomic Energy Agency.

kartini, I. (2004). Pemilu Parlemen ke-7 dan prospek Gerakan Reformasi di Iran. *Jurnal Penelitian Politik*, 49-77.

Kerr, P. K. (2017). *Iran's Nuclear Program: Status*. Washington, D.C., U.S.: Congressional Research Service.

Khalaji, M. E. (2011). *Nuclear Fatwa: Religion and Politics in Iran's Proliferation Strategy*. Washington: The Washington Institute for Near East Policy.

MACALUSO, A. (2014). The Apparent Success of Iran Sanctions. *Working Paper 2*, 11.

Poleman, D. (1982). *Nuclear Power in the Developing World*. London : George Allen and Unwin.

Ray, T. (2003). *Iran at Crossroads*. Middle East Journal.

Widya fitri, M. K. (2013). Analisis Ketidakefektifan sanksi ekonomi AS terhadap Iran dalam Program Comprehensive Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA) tahun 2010-2012. *Jurnal Fisip UI*, 21.

Zarif, M. J. (2007). Tracking The Iran - US Crisis: The Need For A Paradigm Shift. *Journal of International Affairs*, 80.

Website:

Ajjiah. (2012, 06 26). *Bisnis*. Retrieved from [Bisnis.com](http://bandung.bisnis.com/read/20120626/34276/202993/ekspor-minyak-iran-anjlok-40-akibat-embargo-ue):
<http://bandung.bisnis.com/read/20120626/34276/202993/ekspor-minyak-iran-anjlok-40-akibat-embargo-ue>

Alhadar, S. (2017, 05 20). *The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)*. Retrieved from ismes.net:
<http://ismes.net/2017/05/pilpres-iran-moderat-vs-konservatif/>

BBC. (2012, 10 01). *BBC*. Retrieved from [BBC](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/10/121001_iran_currency.shtml):
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/10/121001_iran_currency.shtml

CNN. (2012, 03 06). *CNN*. Retrieved from [edition.cnn.com](https://edition.cnn.com/2012/03/06/world/middle-east/iran-timeline/index.html):
<https://edition.cnn.com/2012/03/06/world/middle-east/iran-timeline/index.html>

MACALUSO, A. (2014). The Apparent Success of Iran Sanctions. *Working Paper 2*, 11.

Nikaen, S. (2013, 6 12). *Deutsche Welle (DW)*. Retrieved from © 2017 Deutsche Welle Website :
<http://www.dw.com/id/tercekiknya-perekonomian-iran/a-16876297>

Tharoor, I. (2015, April 2). *The Washington Post*. Retrieved from [washingtonpost.com](http://www.washingtonpost.com):

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/03/31/the-key-moments-in-the-long-history-of-u-s-iran-tensions/?utm_term=.d4d8a04181c9

United Nation Security Council. (2006, 06 31). *United Nation Security Council*. Retrieved from un.org:
[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1696\(2006\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1696(2006))

United Nation Security Council. (2006, 12 23). *United Nation Security Council*. Retrieved from un.org:
[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737\(2006\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737(2006))

United Nation Security Council. (2007, 03 24). *United Nation Security Council*. Retrieved from un.org:
[www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1747\(2007\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1747(2007))

United Nation Security Council. (2008, 03 24). *United Nation Security Council*. Retrieved from un.org:
[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1803\(2008\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1803(2008))